

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Tentang Subjek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Singkat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berikut adalah perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan sebelum berganti nama:

1. Tahun 1998 dengan nama PPK,
2. Tahun 2006 dengan nama PNPM PPK, dan
3. Tahun 2007 dengan nama PNPM Mandiri Perdesaan.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau

kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk miskin.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

4.1.1.2 Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

1. Tujuan umum, yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
2. Tujuan khusus:
 - a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
 - b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

4.1.1.3 Komponen Program dalam PNPM Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan

partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat, dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

4.1.1.4 Penyaluran dan Pencairan Dana

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana dan prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, pengalokasian dana Bantuan Langsung bagi Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui skema

pembiayaan bersama (*cost sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), seperti yang telah berhasil dilakukan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) III (2005-2007) dan PNPM-PPK (2007). Besarnya *cost sharing* ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.73/PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006.

Melihat kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ditargetkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di perdesaan, maka program ini telah menerima dana hibah yang cukup besar dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan. Melalui PPK dan PNPM PPK (hingga 2007), PNPM Mandiri Perdesaan telah menghimpun lebih dari 168,3 dolar AS dalam bentuk *trust funds* dan hibah dari berbagai negara atau lembaga penyandang dana. Hibah atau *trust funds* tersebut merupakan wujud dukungan dan kepercayaan atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia ini.

4.1.1.5 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Penjelasan V mengenai Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasikan pertemuan-

pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

4.1.1.6 Tugas Pokok dan Tanggung Jawab UPK PNPM Mandiri Perdesaan

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab UPK:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir,
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam,
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya,
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program,
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD),

- i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD atau MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan,
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan,
- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi pelaporan pelaku desa,
- l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD atau MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dan bergulir,
- m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar atau pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah,
- n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat,
- o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan,
- p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan,

- q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.

4.1.1.7 Adminitrasi dan Pelaporan Keuangan UPK

Adminitrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat atau merekam semua kejadian atau transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan. Pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pencatatan semua transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan formulir standar yang terdiri dari buku kas harian, buku bank, buku inventaris, laporan arus dana, neraca, laporan operasional keuangan, laporan perkembangan pinjaman dan laporan kolektibilitas sesuai formulir petunjuk teknik operasional (PTO). Apabila dalam perjalannannya, UPK membutuhkan sistem pencatatan transaksi lebih kompleks, maka dapat dikembangkan sistem pencatatan *double antry* (jurnal, buku besar, lembar kerja neraca hingga menjadi neraca saldo dan sebagainya).

Jenis-jenis administrasi keuangan dan dana bergulir UPK adalah sebagai berikut:

a. Buku Kas Harian

Buku kas harian adalah buku untuk mencatat semua transaksi harian baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang tunai. Sesuai dengan penggolongan jenis dana yang dikelolanya, di UPK terdapat lima jenis yaitu buku kas DOK, buku kas harian bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku kas harian operasional UPK, buku kas harian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan buku kas harian Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP).

b. Buku Bank

Buku bank adalah buku untuk mencatat semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang di bank. Sesuai dengan penggolongan jenis dana dan rekening yang dikelolanya, di UPK terdapat lima buku bank yaitu buku bank DOK, buku bank Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan, buku bank operasional UPK, buku bank UEP, dan buku bank SPP.

c. Buku inventaris adalah buku untuk mencatat semua pembelian barang inventaris UPK yang mencakup akta pembelian, jumlah unit, harga perolehan termasuk nilai penyusutannya.

d. Kartu kredit atau pinjaman kelompok

Kartu kredit kelompok adalah kartu untuk mencatat setiap penerimaan angsuran dari kelompok oleh UPK. Dalam kartu ini tercantum jadwal pembayaran dan besarnya angsuran. Kartu ini bisa juga berfungsi sebagai bukti pembayaran disamping kwitansi penerimaan uang.

Jenis-jenis pelaporan keuangan UPK adalah sebagai berikut:

a. Laporan Arus Dana

Laporan arus dana adalah laporan yang menggambarkan tentang sumber, penggunaan dan perubahan dana dalam satu periode tertentu, yang dimaksud dengan sumber dana disini adalah semua dana yang masuk ke UPK yang berasal dari APBN, APBD, dan swadaya masyarakat seperti BLM dan dana operasional kegiatan (DOK), termasuk juga penerimaan bunga bank dari rekening BLM dan rekening DOK. Penggunaan dana adalah setiap pengeluaran dana yang terkait dengan penyaluran BLM ke desa, penyaluran BLM menjadi operasional UPK serta seluruh penggunaan dana DOK, termasuk pengeluaran pajak dan administrasi bank yang timbul pada rekening BLM dan DOK, sedangkan perubahan dana adalah perubahan posisi saldo awal dan saldo akhir dana karena adanya transaksi (dana masuk-dana keluar) yang terjadi dalam periode tertentu.

b. Neraca

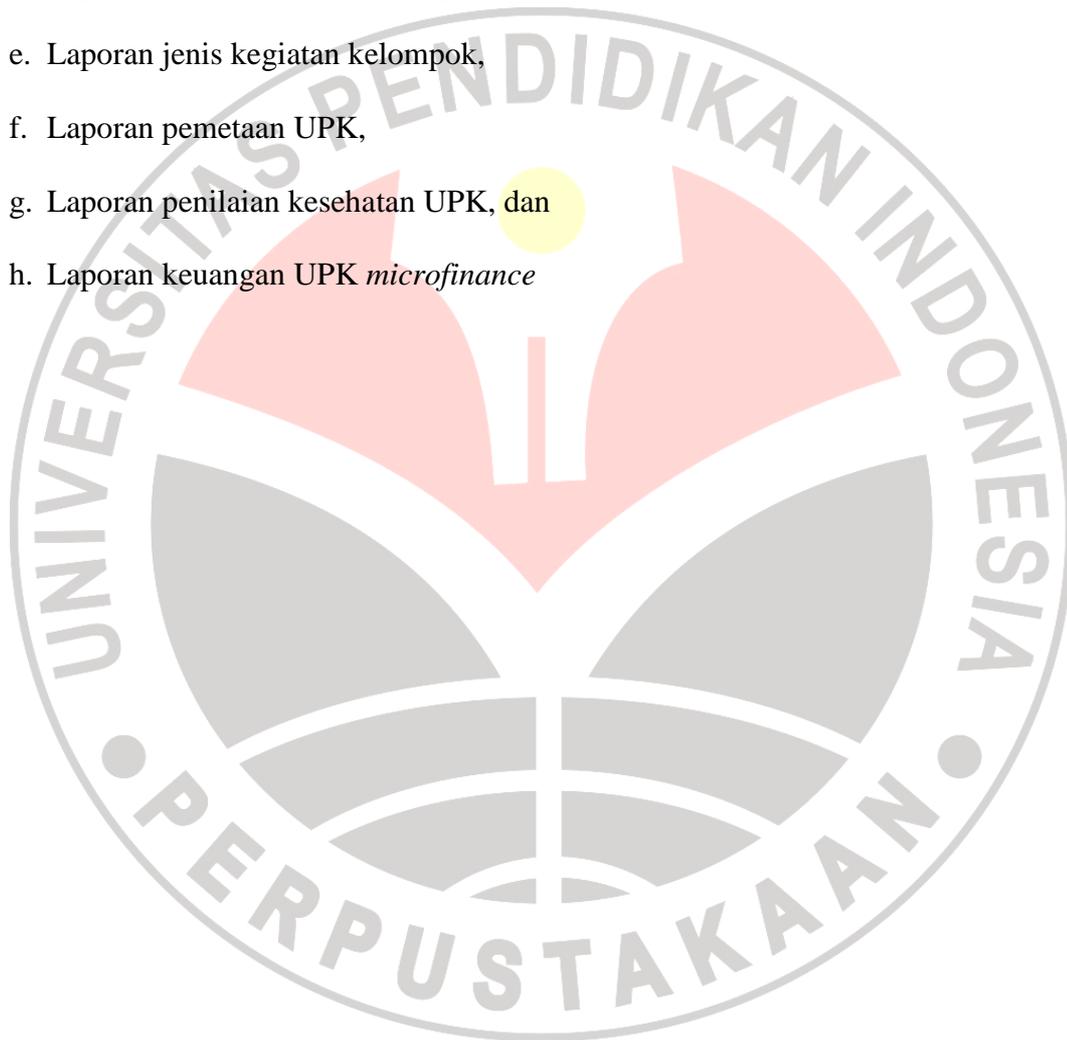
Neraca adalah laporan yang menjelaskan posisi keuangan UPK per tanggal tertentu (akhir bulan atau akhir tahun/Desember XX).

c. Laporan Operasional Keuangan UPK

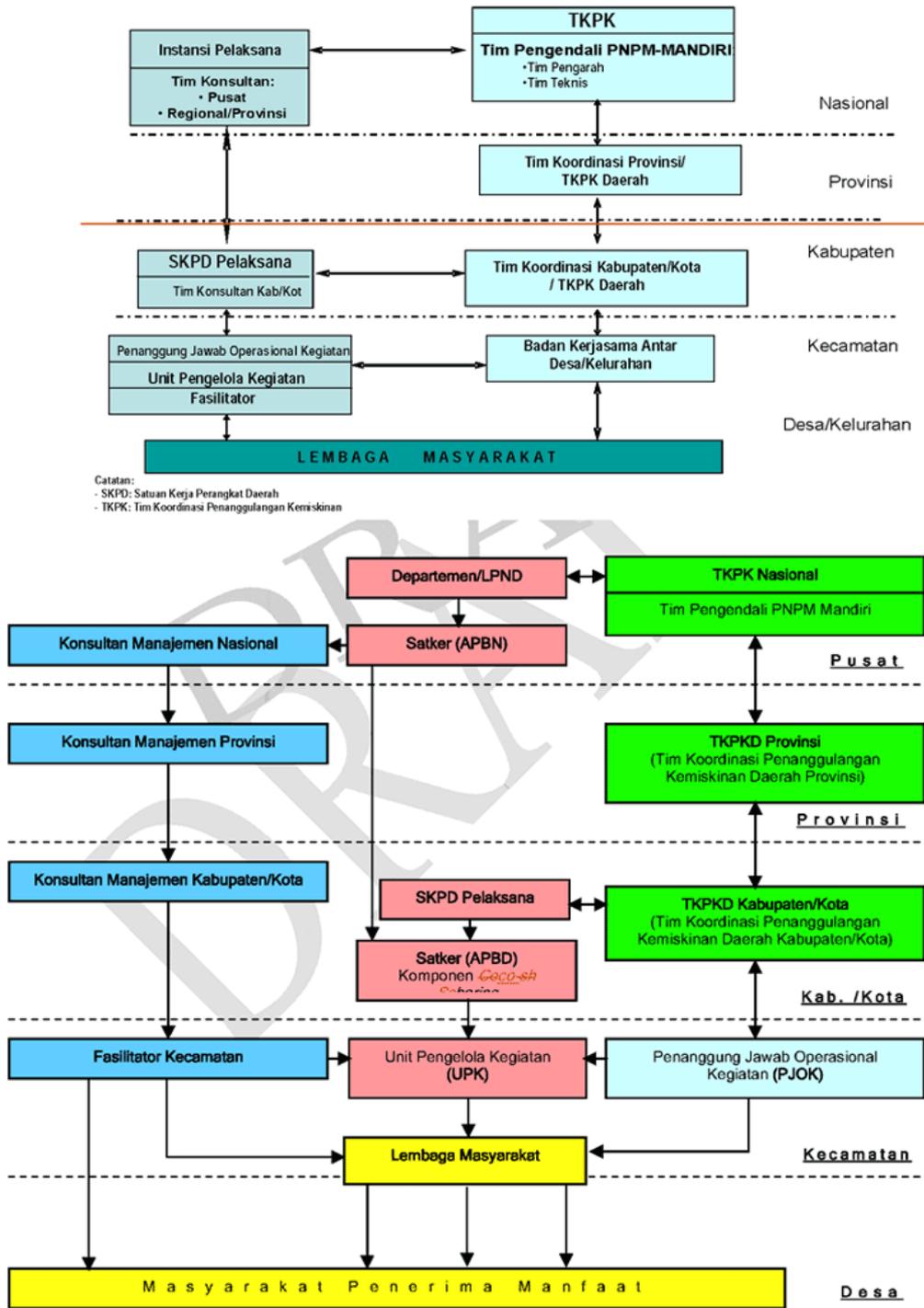
Laporan operasional keuangan adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dari pengembalian jasa pinjaman, bunga bank yang diterima, dan lain-lain serta biaya operasional atau non operasional UPK yang terjadi selama satu periode.

Jenis-jenis laporan dana bergulir UPK adalah sebagai berikut:

- a. Laporan perkembangan pinjaman,
- b. Laporan kolektibilitas,
- c. Laporan pinjaman bermasalah,
- d. Laporan perkembangan kelompok,
- e. Laporan jenis kegiatan kelompok,
- f. Laporan pemetaan UPK,
- g. Laporan penilaian kesehatan UPK, dan
- h. Laporan keuangan UPK *microfinance*



4.1.1.8 Struktur Organisasi PNPM Mandiri



Gambar 4.1
Struktur Organisasi PNPM Mandiri

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.2.1 Deskripsi Variabel X_1

Variabel X_1 pada penelitian ini adalah efisiensi operasional yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefisienan dengan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Dengan kata lain, efisiensi operasional dikaitkan dengan penghematan biaya dan peningkatan pendapatan yang terjadi pada suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dalam penelitian ini adalah BOPO. Apabila nilai BOPO semakin kecil maka dalam perusahaan tersebut dikatakan efisien dalam operasinya, sebaliknya apabila nilai BOPO tinggi maka perusahaan tersebut tidak efisien.

Berikut adalah efisiensi operasional pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut:

Tabel 4.1
Efisiensi Operasional UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut
Periode 2007-2010

No.	Kecamatan	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Cisewu	57.55%	54.32%	47.76%	48.10%
2	Caringin	-	-	-	63.80%
3	Talegong	42.48%	46.51%	90.64%	36.38%
4	Bungbulang	77.01%	64.14%	64.02%	53.80%
5	Mekarmukti	112.46%	130.51%	205.13%	34.83%
6	Pamulihan	41.48%	45.82%	43.83%	39.64%
7	Pakenjeng	86.30%	79.21%	71.44%	35.86%
8	Cikelet	-	-	-	48.79%
9	Cibalong	50.55%	43.38%	26.83%	22.66%
10	Cisompet	52.57%	54.94%	57.81%	58.63%
11	Pendeuy	-	-	143.05%	42.78%
12	Singajaya	64.97%	58.24%	37.63%	35.76%

13	Cihurip	103.07%	111.26%	113.99%	47.54%
14	Cikajang	-	-	-	56.64%
15	Banjarwangi	84.35%	65.50%	39.89%	25.80%
16	Cilawu	-	190.60%	61.28%	34.69%
17	Bayongbong	-	-	-	114.92%
18	Cigedug	-	-	-	50.45%
19	Cisurupan	41.30%	38.15%	35.23%	26.50%
20	Sukaesmi	-	113.78%	65.44%	20.93%
21	Samarang	56.23%	59.28%	41.36%	36.65%
22	Pasirwangi	-	-	-	153.88%
23	Sucinaraja	-	-	120.80%	111.02%
24	Pangatian	-	-	-	69.57%
25	Sukawening	-	-	-	76.96%
26	Karangtengah	-	-	-	56.75%
27	Leuwigoong	-	-	-	54.72%
28	Cibatu	-	-	-	64.01%
29	Kersamanah	-	-	71.04%	65.92%
30	Leles	-	-	-	58.29%
31	Cibiuk	-	-	-	80.76%
32	Kadungora	-	-	-	151.43%
33	Blubur Limbangan	-	-	121.61%	54.17%
34	Selaawi	-	-	71.17%	53.79%
35	Malangbong	-	-	-	42.96%
36	Banyuresmi	-	-	-	56.24%

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut (data diolah kembali)

keterangan: untuk UPK yang belum berdiri, data tidak diisi

Kategori BOPO dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kurang dari 40% dikatakan wajar,
2. Antara 40% sampai 60% dikatakan tinggi, dan
3. Lebih dari 60% dikatakan sangat tinggi.

Berdasarkan kategori di atas, maka nilai di bawah 40% dianggap efisien.

Dari data di atas, dapat digambarkan bahwa:

1. Untuk tahun 2007, tidak ada UPK yang dinyatakan efisien karena besarnya nilai BOPO melebihi nilai 40% sedangkan UPK Kecamatan Mekarmukti

- merupakan UPK dengan penggunaan biaya yang sangat tinggi yaitu mencapai 112,46%,
2. Untuk tahun 2008, UPK yang dikatakan efisien dengan penggunaan biaya terkecil yaitu UPK Kecamatan Cisurupan dengan nilai 38,15%,
 3. Untuk tahun 2009, sebanyak empat UPK dinilai efisien dengan rasio terkecil adalah UPK Cibalong, dan
 4. Untuk tahun 2010, sebanyak 11 dari 36 UPK dinilai efisien.

4.1.2.2 Deskripsi Variabel X₂

Kualitas kredit pada penelitian ini adalah sebagai variabel X₂. Indikator dalam menilai kualitas kredit yaitu NPL, dimana apabila nilai NPL semakin kecil maka kualitas kredit bisa dikatakan baik. Namun sebaliknya, jika nilai NPL semakin besar maka kualitas kredit bisa dinilai tidak baik bahkan bisa dikatakan buruk.

Berikut adalah kualitas kredit pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut:

Tabel 4.2
Kualitas Kredit UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-kabupaten Garut
Periode 2007-2010

No.	Kecamatan	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Cisewu	1.11%	1.02%	2.61%	2.32%
2	Caringin	-	-	-	3.04%
3	Talegong	5.04%	12.61%	1.51%	1.17%
4	Bungbulang	7.64%	7.41%	2.29%	4.16%
5	Mekarmukti	23.87%	21.93%	2.49%	8.37%

6	Pamulihan	7.04%	3.32%	0.86%	1.23%
7	Pakenjeng	9.48%	9.46%	9.06%	8.57%
8	Cikelet	-	-	-	0.00%
9	Cibalong	2.91%	1.99%	0.99%	1.84%
10	Cisompet	3.19%	2.69%	1.96%	1.93%
11	Pendeuy	-	-	0.00%	0.00%
12	Singajaya	4.22%	2.98%	0.59%	0.57%
13	Cihurip	3.44%	9.99%	5.12%	0.00%
14	Cikajang	-	-	-	0.00%
15	Banjarwangi	1.55%	1.32%	2.51%	6.40%
16	Cilawu	-	0.00%	0.00%	0.00%
17	Bayongbong	-	-	-	0.00%
18	Cigedug	-	-	-	0.34%
19	Cisurupan	5.33%	4.38%	2.40%	3.16%
20	Sukaesmi	-	0.00%	0.00%	0.00%
21	Samarang	2.20%	2.26%	1.82%	0.72%
22	Pasirwangi	-	-	-	0.00%
23	Sucinaraja	-	-	0.00%	0.00%
24	Pangatian	-	-	-	0.00%
25	Sukawening	-	-	-	0.00%
26	Karangtengah	-	-	-	0.00%
27	Leuwigoong	-	-	-	0.00%
28	Cibatu	-	-	-	0.00%
29	Kersamanah	-	-	0.00%	0.00%
30	Leles	-	-	-	0.00%
31	Cibiuk	-	-	-	0.00%
32	Kadungora	-	-	-	0.00%
33	Blubur Limbangan	-	-	0.00%	0.00%
34	Selaawi	-	-	0.00%	0.00%
35	Malangbong	-	-	-	0.00%
36	Banyuresmi	-	-	-	0.00%

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut (data diolah kembali)

keterangan: untuk UPK yang belum berdiri, data tidak diisi

1. Untuk tahun 2007, Kecamatan Cisewu dikatakan kualitas kreditnya baik hal ini karena nilai NPL yang paling kecil diantara UPK lainnya yaitu sebesar 1,11%
2. Untuk tahun 2008, ada dua UPK yang dinilai kualitas kreditnya baik yaitu UPK Kecamatan Cilawu dan UPK Kecamatan Sukaesmi.

3. Untuk tahun 2009, sebanyak tujuh UPK yang kualitas kreditnya baik dengan nilai NPL 0%.
4. Untuk tahun 2010, sebanyak 20 UPK kualitas kreditnya dikatakan baik.

4.1.2.3 Deskripsi Variabel Y

Profitabilitas sebagai variabel Y diukur dengan menggunakan indikator *profit margin* (PM). Semakin tinggi nilai PM maka profitabilitasnya tinggi, sebaliknya jika nilai PM rendah maka profitabilitasnya rendah pula. Secara eksplisit, PNPM Mandiri Perdesaan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau berkaitan dengan profit, akan tetapi pada kenyataannya nilai profitabilitas ini merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja UPK PNPM Mandiri perdesaan.

Berikut adalah profitabilitas pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut:

Tabel 4.3

Profitabilitas UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-kabupaten Garut

Periode 2007-2010

No.	Kecamatan	Tahun			
		2007	2008	2009	2010
1	Cisewu	43.80%	46.81%	52.89%	49.25%
2	Caringin	-	-	-	36.42%
3	Talegong	60.24%	57.66%	27.05%	60.27%
4	Bungbulang	25.03%	36.79%	36.41%	58.96%
5	Mekarmukti	-12.22%	-30.23%	55.67%	65.75%
6	Pamulihan	59.34%	55.27%	56.48%	49.92%
7	Pakenjeng	15.20%	22.43%	30.37%	64.62%
8	Cikelet	-	-	-	50.98%

9	Cibalong	51.24%	57.65%	73.16%	77.36%
10	Cisompet	49.42%	46.94%	42.89%	42.83%
11	Pendeuy	-	-	-41.50%	59.76%
12	Singajaya	42.83%	48.30%	65.93%	67.31%
13	Cihurip	3.40%	-4.70%	-7.20%	52.87%
14	Cikajang	-	-	-	42.61%
15	Banjarwangi	21.43%	37.22%	60.45%	74.32%
16	Cilawu	-	-60.90%	42.09%	66.06%
17	Bayongbong	-	-	-	8.29%
18	Cigedug	-	-	-	52.67%
19	Cisurupan	60.05%	62.13%	65.01%	65.69%
20	Sukaesmi	-	-13.54%	36.03%	79.04%
21	Samarang	45.16%	42.44%	52.35%	61.58%
22	Pasirwangi	-	-	-	-5.07%
23	Sucinaraja	-	-	-20.93%	8.68%
24	Pangatikan	-	-	-	30.65%
25	Sukawening	-	-	-	29.57%
26	Karantengah	-	-	-	49.03%
27	Leuwigoong	-	-	-	48.70%
28	Cibatu	-	-	-	40.07%
29	Kersamanah	-	-	30.99%	41.46%
30	Leles	-	-	-	32.48%
31	Cibiuk	-	-	-	25.20%
32	Kadungora	-	-	-	-4.18%
33	Blubur Limbangan	-	-	-21.69%	47.09%
34	Selaawi	-	-	32.28%	47.71%
35	Malangbong	-	-	-	57.45%
36	Banyuresmi	-	-	-	46.95%

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut (data diolah kembali)

keterangan: untuk UPK yang belum berdiri, data tidak diisi

1. Untuk tahun 2007, UPK Kecamatan Talegong memperoleh profitabilitas tertinggi dengan angka 60,24%,
2. Untuk tahun 2008, sebanyak empat UPK memperoleh profitabilitas yang cukup tinggi yaitu melebihi angka 50%,
3. Untuk tahun 2009, UPK Kecamatan Cibalong menunjukkan profitabilitas tertinggi dengan nilai 73,16%, dan

4. Untuk tahun 2010, UPK Kecamatan Sukaresmi profitabilitasnya mencapai 79,04%, ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan UPK lainnya.

4.1.3 Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui bagaimana suatu penelitian berpengaruh dan berapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen maka harus dilakukan pengujian hipotesis. Tabel 4.4 adalah data yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengujian statistik.

Tabel 4.4
Data Variabel X_1 , X_2 , dan Y

No.	X_1	X_2	Y	No.	X_1	X_2	Y
1	57.55%	1.11%	43.80%	43	65.44%	0.00%	36.03%
2	42.48%	5.04%	60.24%	44	41.36%	1.82%	52.35%
3	77.01%	7.64%	25.03%	45	120.80%	0.00%	-20.93%
4	112.46%	23.87%	-12.22%	46	71.04%	0.00%	30.99%
5	41.48%	7.04%	59.34%	47	121.61%	0.00%	-21.69%
6	86.30%	9.48%	15.20%	48	71.17%	0.00%	32.28%
7	50.55%	2.91%	51.24%	49	48.10%	2.32%	49.25%
8	52.57%	3.19%	49.42%	50	63.80%	3.04%	36.42%
9	64.97%	4.22%	42.83%	51	36.38%	1.17%	60.27%
10	103.07%	3.44%	3.40%	52	53.80%	4.16%	58.96%
11	84.35%	1.55%	21.43%	53	34.83%	8.37%	65.75%
12	41.30%	5.33%	60.05%	54	39.64%	1.23%	49.92%
13	56.23%	2.20%	45.16%	55	35.86%	8.57%	64.62%
14	54.32%	1.02%	46.81%	56	48.79%	0.00%	50.98%
15	46.51%	12.61%	57.66%	57	22.66%	1.84%	77.36%
16	64.14%	7.41%	36.79%	58	58.63%	1.93%	42.83%
17	130.51%	21.93%	-30.23%	59	42.78%	0.00%	59.76%
18	45.82%	3.32%	55.27%	60	35.76%	0.57%	67.31%
19	79.21%	9.46%	22.43%	61	47.54%	0.00%	52.87%
20	43.38%	1.99%	57.65%	62	56.64%	0.00%	42.61%
21	54.94%	2.69%	46.94%	63	25.80%	6.40%	74.32%

22	58.24%	2.98%	48.30%	64	34.69%	0.00%	66.06%
23	111.26%	9.99%	-4.70%	65	114.92%	0.00%	8.29%
24	65.50%	1.32%	37.22%	66	50.45%	0.34%	52.67%
25	190.60%	0.00%	-60.90%	67	26.50%	3.16%	65.69%
26	38.15%	4.38%	62.13%	68	20.93%	0.00%	79.04%
27	113.78%	0.00%	-13.54%	69	36.65%	0.72%	61.58%
28	59.28%	2.26%	42.44%	70	153.88%	0.00%	-5.07%
29	47.76%	2.61%	52.89%	71	111.02%	0.00%	8.68%
30	90.64%	1.51%	27.05%	72	69.57%	0.00%	30.65%
31	64.02%	2.29%	36.41%	73	76.96%	0.00%	29.57%
32	205.13%	2.49%	55.67%	74	56.75%	0.00%	49.03%
33	43.83%	0.86%	56.48%	75	54.72%	0.00%	48.70%
34	71.44%	9.06%	30.37%	76	64.01%	0.00%	40.07%
35	26.83%	0.99%	73.16%	77	65.92%	0.00%	41.46%
36	57.81%	1.96%	42.89%	78	58.29%	0.00%	32.48%
37	143.05%	0.00%	-41.50%	79	80.76%	0.00%	25.20%
38	37.63%	0.59%	65.93%	80	151.43%	0.00%	-4.18%
39	113.99%	5.12%	-7.20%	81	54.17%	0.00%	47.09%
40	39.89%	2.51%	60.45%	82	53.79%	0.00%	47.71%
41	61.28%	0.00%	42.09%	83	42.96%	0.00%	57.45%
42	35.23%	2.40%	65.01%	84	56.27%	0.00%	46.95%

sumber: PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Garut (data diolah kembali)

4.1.3.1 Analisis Korelasi Parsial

Dalam analisis korelasi parsial, akan diketahui besarnya koefisien korelasi yang menyatakan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini juga menunjukkan seberapa kuatnya hubungan pada variabel-variabel yang diteliti.

Dengan menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* pada *software SPSS 16.0 for windows*, di bawah ini adalah hasil pengujiannya:

Tabel 4.5
 Analisis Korelasi Parsial
 (NPL sebagai variabel kontrol)

Correlations

Control Variables			BOPO	PM
NPL	BOPO	Correlation	1.000	-.849
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	81
PM	PM	Correlation	-.849	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	81	0

Berdasarkan tabel di atas, besarnya koefisien korelasi parsial antara efisiensi operasional (BOPO) dengan profitabilitas (PM) dimana pada analisis ini kualitas kredit (NPL) sebagai variabel kontrolnya adalah sebesar -0,849. Angka tersebut mengandung pengertian bahwa terdapat hubungan negatif antara BOPO dan PM sebesar 0,849 tergolong sebagai hubungan yang sangat kuat.

Tabel 4.6
 Analisis Korelasi Parsial
 (BOPO sebagai variabel kontrol)

Correlations

Control Variables			NPL	PM
BOPO	NPL	Correlation	1.000	-.173
		Significance (2-tailed)	.	.117
		df	0	81
PM	PM	Correlation	-.173	1.000
		Significance (2-tailed)	.117	.
		df	81	0

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa besarnya hubungan kualitas kredit (NPL) terhadap profitabilitas (PM) dengan efisiensi operasional (BOPO) sebagai variabel kontrol ditunjukkan oleh koefisien korelasi sebesar -0,173 atau masuk ke dalam kategori sangat rendah. Besarnya koefisien korelasi tersebut mengandung pengertian bahwa terdapat hubungan negatif sebesar 0,173 antara kualitas kredit (NPL) dan profitabilitas (PM).

4.1.3.2 Analisis Koefisien Determinasi untuk Uji Parsial

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh pada variabel-variabel yang diteliti dimana yang menjadi acuan pada perhitungan koefisien determinasi adalah dengan mengkuadratkan koefisien korelasi.

Koefisien determinasi parsial:

1. Efisiensi operasional (BOPO) terhadap profitabilitas (PM) dengan kualitas kredit (NPL) sebagai variabel kontrol.

$$\begin{aligned}KD &= (-0,849)^2 \\ &= 0,721\end{aligned}$$

Koefisien determinasi pada perhitungan di atas menunjukkan nilai 0,721 atau 72,1%. Nilai tersebut mengandung pengertian bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh efisiensi operasional sebesar 72,1%.

2. Kualitas kredit (NPL) terhadap profitabilitas (PM) dengan efisiensi operasional (BOPO) sebagai variabel kontrol.

$$KD = (-0,173)^2$$

$$= 0,030$$

Berdasarkan perhitungan di atas, koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,030 atau 3%. Dengan kata lain, kualitas kredit mempengaruhi profitabilitas sebesar 3%.

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat maka harus dilakukan pengujian hipotesis secara parsial (uji t).

Berikut adalah perhitungannya:

Tabel 4.7

Uji t

Variabel	t Hitung	t Tabel	Keputusan	Pengaruh
X ₁	-14,463	1,9918	Menolak H ₀	signifikan
X ₂	-1,584	1,9918	Menerima H ₀	tidak signifikan

Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka dapat dikatakan H₀ ditolak, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara efisiensi operasional terhadap profitabilitas. Akan tetapi, pada variabel X₂ nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H₀ diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara kualitas kredit terhadap profitabilitas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara efisiensi operasional terhadap profitabilitas sebesar 72,1%, sedangkan antara kualitas kredit dan profitabilitas memiliki pengaruh sebesar 3%.

4.1.3.3 Analisis Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Berikut adalah analisis korelasi berganda:

Tabel 4.8
Analisis Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.854 ^a	.729	.723	.14800

a. Predictors: (Constant), NPL, BOPO

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa korelasi antara NPL, dan BOPO terhadap PM sebesar 0,854, nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang termasuk ke dalam kategori kuat dimana hasil koefisien korelasi tersebut adalah bertanda positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti efisiensi operasional dan kualitas kredit secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas, jika terjadi peningkatan pada efisiensi operasional dan kualitas kredit maka profitabilitas akan mengalami kenaikan.

Untuk menguji variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen maka dilakukan uji F, berikut adalah uraiannya:

Tabel 4.9

Uji F

F hitung	F Tabel	Keputusan	Pengaruh
53.16190	3,11	Menolak H_0	Berpengaruh signifikan secara simultan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara efisiensi operasional dan kualitas kredit terhadap profitabilitas yaitu sebesar 0,729 atau 72,9%.

4.2 Pembahasan

Pada penelitian ini dibahas mengenai pengaruh efisiensi operasional dan kualitas kredit pada profitabilitas dengan subjek penelitian adalah UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut. Meskipun profitabilitas bukan tujuan utama dari UPK PNPM Mandiri Perdesaan, akan tetapi pada kenyataannya profitabilitas ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja UPK sehingga UPK memiliki potensi untuk berkelanjutan dimasa mendatang. Apabila profitabilitas naik, maka kinerja UPK bisa dikatakan baik. Namun sebaliknya, jika profitabilitas menurun, maka kinerja UPK dinilai menurun pula. Banyaknya UPK yang diteliti dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini yang membuat penulis mengambil sampel purposif yang telah diuraikan sebelumnya.

4.2.1 Efisiensi Operasional UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai besarnya persentase untuk masing-masing variabel pada penelitian ini. Sejak tahun 2007-2010, UPK Kecamatan Cibalong adalah UPK yang efisiensi operasionalnya

menunjukkan nilai yang semakin menurun dari tahun ke tahun hingga tahun 2010 mencapai 22,66%. Besarnya nilai tersebut diperoleh dari total pendapatan operasional yang mencapai nilai Rp. 520.177.575,00, dimana nilai terbesar yaitu pembelian SPP sebesar Rp. 397.454.085,00 sedangkan total biaya operasional sebesar Rp. 117.886.389,00 dimana honor pengurus UPK dan biaya operasional lain-lain yang mencapai nilai Rp. 93.264.000,00.

Nilai BOPO terbesar terjadi pada UPK Kecamatan Mekarmukti yang mencapai angka 205,13% yaitu pada tahun 2009. Besarnya nilai BOPO ini dipicu oleh besarnya total biaya operasional sebesar Rp. 14.246.150,00 sedangkan total pendapatan operasional mencapai Rp. 6.945.000,00. Namun BOPO terkecil menunjukkan nilai 20,93%, untuk UPK Kecamatan Sukaresmi pada tahun 2010. Kecilnya nilai BOPO ini dikarenakan biaya operasional yang mencapai Rp. 68.214.704,00 dimana honor pengurus UPK merupakan biaya yang paling besar diantara biaya-biaya operasional yang lain. Total pendapatan operasional diperoleh dari jasa pengembalian SPP mencapai Rp. 325.931.300,00.

Rata-rata efisiensi operasional untuk Kabupaten Garut adalah sebesar 67,16%. Dikarenakan rata-rata melebihi angka 40%, maka nilai ini masuk ke dalam kategori biaya tinggi.

4.2.2 Kualitas Kredit UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut

Kualitas kredit pada UPK PNPM Mandiri se-Kabupaten Garut menunjukkan angka rata-rata sebesar 2,81%. Angka tersebut bisa dikatakan relatif

kecil, hal ini dikarenakan banyak UPK yang baru berdiri khususnya tahun 2010 dimana nilai NPL menunjukkan angka 0. NPL terbesar yaitu 23,87% terjadi pada UPK Kecamatan Mekarmukti pada tahun 2007 dengan kolektibilitas III, IV, dan V mencapai Rp. 171.795.300,00 untuk pinjaman UEP dan Rp. 6.519.200,00 untuk pinjaman SPP dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp. 746.959.900,00.

4.2.3 Profitabilitas UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut

Besarnya profitabilitas pada UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut mencapai rata-rata 38,34%. UPK Cibalong dinilai paling konsisten dalam hal profitabilitas, hal ini bisa terlihat dari besarnya angka yang dari tahun ke tahun semakin meningkat yang dipicu oleh besarnya pendapatan operasional yaitu jasa pengembalian UEP dan SPP. UPK Kecamatan Sukaresmi memperoleh profitabilitas terbesar mencapai 79,04% yaitu pada tahun 2010, hal ini dipicu oleh besarnya pendapatan operasional dari jasa pengembalian SPP yang mencapai Rp. 325.931.300,00 dengan total pendapatan sebesar Rp. 333.468.558,00 sedangkan total biaya yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp. 69.890.338,00

Profitabilitas terkecil yang diperoleh UPK Kecamatan Cilawu pada tahun 2008 yaitu -60,90%, ini disebabkan oleh besarnya biaya yang mencapai Rp. 13.882.767,00 yaitu tingginya honor pengurus UPK sebesar Rp. 7.600.000,00 sedangkan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 8.628.321,00 dengan pendapatan terbesar diperoleh dari jasa pengembalian SPP sebesar Rp. 7.120.000,00.

4.2.4 Pengaruh Efisiensi Operasional dan Kualitas Kredit terhadap Profitabilitas UPK PNPM Mandiri Perdesaan se-Kabupaten Garut

Pada penelitian sebelumnya dan didukung dengan beberapa teori menyatakan bahwa efisiensi operasional dan kualitas kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk menguji hal tersebut, analisis yang digunakan adalah analisis korelasi *Pearson Product Moment*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan untuk mengetahui pengaruh di antara variabel-variabel yang diteliti, penulis menggunakan koefisien determinasi.

Dengan menggunakan bantuan *software SPSS for windows*, pengolahan data akan menjadi sangat mudah. Hasil yang diperoleh adalah nilai koefisien menunjukkan nilai -0,849 untuk efisiensi operasional terhadap profitabilitas dengan kualitas kredit sebagai variabel kontrol, sedangkan kualitas kredit terhadap profitabilitas dengan efisiensi operasional sebagai variabel kontrol menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,173. Pada uji simultan, hasil perhitungan diperoleh nilai sebesar 0,854.

Besarnya nilai koefisien korelasi dijadikan acuan untuk memperoleh nilai koefisien determinasi. Pada uji parsial, efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 72,1 % dan kualitas kredit berpengaruh terhadap profitabilitas sebesar 3%, sedangkan pada uji simultan efisiensi operasional dan kualitas kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas sebesar 72,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Pengaruh tersebut memiliki pengertian bahwa jika terjadi peningkatan pada

efisiensi operasional dan kualitas kredit maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan yang menyatakan bahwa efisiensi operasional dan kualitas kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Menurut Siamat (dalam Nur Hasanah Sebatiningrum, 2006: 52), yang menyebutkan bahwa 'tingkat BOPO yang menurun menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai perusahaan, hal ini berarti semakin efisien aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan'. Teori tersebut terbukti pada penelitian ini, dimana efisiensi operasional memberikan pengaruh sebesar 72,1% terhadap profitabilitas.

Berkaitan dengan NPL, menurut Muburoh (dalam Ahmad Buyung Nusantara, 2009: 13) 'NPL berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan'. Ketika NPL menunjukkan nilai yang semakin tinggi, maka kinerja perbankan khususnya profitabilitas akan menurun. Karena NPL merupakan bagian dari kualitas kredit yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet, apabila nilai NPL tinggi maka kualitas kredit dikatakan buruk. Pada penelitian ini teori Muburoh terbukti yaitu kualitas kredit dengan indikator NPL memberikan pengaruh sebesar 3% terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Yuliani (2007) yang menyatakan bahwa efisiensi operasional memberikan kontribusi terhadap profitabilitas dengan mencapai nilai 79,2%,

2. Ahmad Buyung Nusantara (2009) yang menunjukkan bahwa NPL dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA (indikator yang digunakan pada profitabilitas).
3. Hendry Sihombing (2006) yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan kualitas kredit mempunyai peranan dalam pencapaian tingkat profitabilitas.

